

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi regional merupakan inti dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Proses ini bersifat multidimensional, tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai output ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB), tetapi juga pada perbaikan struktur ekonomi, pemerataan pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Dalam kerangka teoretis, khususnya yang didasarkan pada teori pertumbuhan endogen, kemajuan ekonomi jangka panjang sangat bergantung pada optimalisasi faktor-faktor internal, termasuk akumulasi modal fisik, modal manusia, dan inovasi teknologi. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah untuk mengelola faktor-faktor internal ini menjadi kunci utama dalam mencapai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang berkelanjutan dan berdaya tahan (Ridwan & Saprudin, 2024).

Dalam kerangka transformasi struktural ekonomi, sektor industri pengolahan memegang peranan vital sebagai mesin pembangunan. Industrialisasi tidak hanya berfungsi mengolah bahan mentah menjadi barang bernilai tinggi, tetapi juga menciptakan nilai tambah tertinggi dibandingkan sektor primer, menghasilkan *multiplier effect* yang luas, yang sangat penting bagi percepatan pembangunan regional (Yasin, 2023). Kemajuan sektor ini mampu memacu pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Kinerja ekonomi nasional Indonesia sangat bergantung pada kinerja regional, di mana Pulau Jawa konsisten menjadi pusat gravitasi ekonomi terbesar di tingkat domestik. Berdasarkan laporan data Produk Domestik Bruto (PDB) triwulanan yang dirilis resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa menyumbang kontribusi dominan sebesar 56,83% terhadap perekonomian nasional. Dominasi spasial ini secara struktural didorong oleh masifnya konsentrasi sektor industri pengolahan di koridor tersebut. Merujuk pada pembaruan data Kementerian Perindustrian Republik

Indonesia, sekitar 54,34% dari total luasan lahan kawasan industri nasional masih terpusat di Pulau Jawa, dengan Provinsi Jawa Barat bertindak sebagai salah satu jangkar penopang utama sekaligus lokomotif utama pertumbuhan industri manufaktur nasional.

Meskipun memegang peran dominan dalam industrialisasi, laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa barat dalam rentang waktu 2015 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi signifikan. Data BPS mencatat bahwa Pertumbuhan Ekonomi Jawa barat sempat mencapai titik puncaknya sebesar 5,67% pada tahun 2016, namun mengalami volatilitas, terutama di tengah guncangan global, dengan data terbaru tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,95% (C-to-C) (BPS Jabar).

Perbedaan antara laju pertumbuhan tertinggi dan terbaru ini dalam kurun waktu sepuluh tahun di provinsi yang sangat terindustrialisasi menunjukkan adanya tekanan struktural atau adanya ketidakmampuan industrialisasi untuk menjaga momentum pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Volatilitas ini memicu pertanyaan mendasar mengenai faktor penentu yang sesungguhnya di tingkat Kabupaten/Kota, dan menuntut analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi wilayah mana yang resilien dan mana yang rentan terhadap guncangan ekonomi.

Tabel 1.1
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Persen) Tahun 2015-2024

No	Kabupaten/kota	Tahun									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Bogor	6,09	5,84	5,92	6,19	5,85	-1,76	3,55	5,25	5,19	5,21
2	Kabupaten Sukabumi	4,91	5,85	5,75	5,81	5,64	-0,91	3,74	5,12	5,17	5,15
3	Kabupaten Cianjur	5,45	6,43	5,77	6,24	5,67	-0,77	3,48	5,04	5,16	5,14
4	Kabupaten Bandung	5,89	6,34	6,15	6,26	6,36	-1,8	3,56	5,35	4,97	5,04
5	Kabupaten Garut	4,51	5,9	4,91	4,96	5,02	-1,26	3,58	5,08	4,94	4,95
6	Kabupaten Tasikmalaya	4,31	5,91	5,95	5,7	5,43	-0,98	3,43	4,7	4,69	4,64
7	Kabupaten Ciamis	5,59	5,99	5,21	5,31	5,38	-0,14	3,66	5,02	4,99	4,97
8	Kabupaten Kuningan	6,38	6,09	6,36	6,43	6,59	0,11	3,56	5,53	5,25	5,61
9	Kabupaten Cirebon	4,88	5,63	5,06	5,02	4,68	-1,08	2,47	4,09	4,85	5,83
10	Kabupaten Majalengka	5,33	6,03	6,81	6,48	7,77	0,89	4,75	6,63	6,15	6,38
11	Kabupaten Sumedang	5,25	5,7	6,23	5,79	6,33	-1,12	3,17	5,03	5,01	4,05
12	Kabupaten Indramayu	2,16	0,08	1,43	1,34	3,2	-1,58	0,58	2,88	9,76	2,18
13	Kabupaten Subang	5,29	5,4	5,1	4,41	4,61	-1,15	2,18	4,29	4,64	4,81

No	Kabupaten/kota	Tahun									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14	Kabupaten Purwakarta	4,76	5,99	5,15	4,98	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97	4,64
15	Kabupaten Karawang	4,5	6,55	5,13	6,04	4,21	-3,8	5,85	6,31	5,4	4,2
16	Kabupaten Bekasi	4,46	4,84	5,68	6,02	3,95	-3,39	3,62	5,3	5,32	5,17
17	Kabupaten Bandung Barat	5,03	5,65	5,21	5,5	5,05	-2,41	3,46	5,34	5	4,94
18	Kabupaten Pangandaran	4,98	5,29	5,1	5,32	5,94	-0,05	3,67	5,03	5,26	5,12
19	Kota Bogor	6,14	6,73	6,12	6,14	6,19	-0,41	3,76	5,65	5,1	5,15
20	Kota Sukabumi	5,14	5,64	5,43	5,52	5,53	-1,49	3,71	5,35	5,12	5,11
21	Kota Bandung	7,64	7,79	7,21	7,08	6,79	-2,28	3,76	5,41	5,07	4,99
22	Kota Cirebon	5,81	6,09	5,8	6,2	6,29	-0,98	3,05	5,1	5,01	5,02
23	Kota Bekasi	5,56	6,09	5,73	5,86	5,41	-2,58	3,22	4,96	5,43	5,19
24	Kota Depok	6,64	7,28	6,75	6,97	6,74	-1,92	3,76	5,24	5,05	5,47
25	Kota Cimahi	5,43	5,63	5,43	6,46	7,85	-2,26	4,19	5,92	5,19	5,26
26	Kota Tasikmalaya	6,3	6,91	6,07	5,93	5,97	-2,01	3,57	5,01	5,96	5,22
27	Kota Banjar	5,32	5,66	5,3	5,05	5,03	0,94	3,49	4,29	4,71	5,48

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2024

Variabel kunci pertama yang dipertimbangkan adalah Jumlah Industri Besar dan Sedang (IBS), yang merepresentasikan investasi modal dan teknologi. Sektor industri memiliki peran yang sangat penting sebagai mesin pembangunan dan merupakan salah satu komponen kunci dalam kebijakan ekonomi, sebab kemajuan sektor ini dapat memacu pembangunan sektor-sektor lainnya. Secara umum, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari bertambahnya produk barang dan jasa yang dihasilkan, yang mana dalam konteks industri, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah unit usaha yang memproduksi barang. Jumlah Industri Besar dan Sedang merujuk pada perusahaan industri pengolahan yang memiliki tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih (Industri Besar) dan perusahaan dengan tenaga kerja 20 hingga 99 orang (Industri Sedang). Peningkatan jumlah industri yang cepat dapat mendorong berkembangnya industri lain, sehingga mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat wilayah (Salsabilla, 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2023) di Kota Medan tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa variabel Jumlah Industri Besar dan Sedang berpengaruh secara parsial dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini memperkuat literatur ekonomi yang menyatakan bahwa keberadaan sektor industri memiliki *multiplier effect* terhadap pendapatan daerah. Logikanya, peningkatan jumlah industri akan mendorong

produktivitas dan nilai tambah output, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Amalia, 2023).

Namun, kondisi di lapangan dapat menunjukkan adanya fluktuasi. Sebagai contoh, di Kota Medan, jumlah industri besar dan sedang mengalami fluktuasi, bahkan cenderung menurun dari 328 unit di tahun 2016 menjadi 261 unit di tahun 2021, padahal pertumbuhan ekonomi di kota tersebut juga berfluktuasi. Fenomena serupa mungkin terjadi di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data, jumlah perusahaan Industri Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren yang beragam di berbagai kabupaten/kota.

Tabel 1.2
Data Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (unit) Tahun 2015-2024

No	Kabupaten/kota	Tahun									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Bogor	740	714	897	1142	1207	1123	1064	1052	1532	1772
2	Kabupaten Sukabumi	251	252	328	277	206	194	378	362	235	281
3	Kabupaten Cianjur	96	95	86	67	64	63	87	87	94	129
4	Kabupaten Bandung	1117	1057	1565	1525	1514	1189	1086	1087	857	960
5	Kabupaten Garut	202	187	160	156	150	140	174	149	114	161
6	Kabupaten Tasikmalaya	56	53	58	56	43	27	38	36	72	122
7	Kabupaten Ciamis	84	84	99	83	77	71	73	71	38	136
8	Kabupaten Kuningan	39	36	62	51	41	38	41	43	43	92
9	Kabupaten Cirebon	349	323	471	373	367	338	386	373	303	348
10	Kabupaten Majalengka	430	414	402	303	290	286	279	279	112	322
11	Kabupaten Sumedang	79	78	126	124	112	112	121	124	153	169
12	Kabupaten Indramayu	82	80	83	77	71	69	122	123	46	55
13	Kabupaten Subang	35	32	111	94	92	99	119	115	129	126
14	Kabupaten Purwakarta	180	170	268	213	191	195	225	226	260	279
15	Kabupaten Karawang	570	542	724	647	580	511	557	543	729	700
16	Kabupaten Bekasi	1150	1143	2503	2385	1930	1919	2053	2052	2529	2447
17	Kabupaten Bandung Barat	184	179	284	246	228	210	257	256	300	668
18	Kabupaten Pangandaran	1	1	9	8	8	9	10	8	7	192
19	Kota Bogor	94	93	97	87	75	78	96	95	217	285
20	Kota Sukabumi	21	20	20	16	15	14	18	18	35	30
21	Kota Bandung	508	488	701	661	627	649	636	613	849	852
22	Kota Cirebon	50	48	57	59	57	44	45	42	42	45
23	Kota Bekasi	204	198	486	384	358	438	527	530	884	789
24	Kota Depok	102	102	173	146	142	128	146	144	249	367
25	Kota Cimahi	163	159	236	204	194	178	192	196	240	297
26	Kota Tasikmalaya	66	64	81	73	73	84	71	72	61	89
27	Kota Banjar	21	21	12	13	12	9	21	18	45	34

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat & BPS
Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2024*

Berdasarkan tabel 1.2, Kabupaten Bogor mengalami peningkatan signifikan dari 714 unit pada tahun 2016 menjadi 1.772 unit pada tahun 2024. Sebaliknya, Kabupaten Bandung menunjukkan penurunan dari 1.057 unit pada tahun 2016 menjadi 960 unit pada tahun 2024, meskipun sempat mencapai 1.565 unit di tahun 2017. Secara keseluruhan, Kabupaten Bekasi mencatat jumlah tertinggi, dari 1.143 unit di tahun 2016 menjadi 2.447 unit di tahun 2024. Keragaman data ini menunjukkan bahwa meskipun secara teori dan hasil penelitian Jumlah Industri Besar dan Sedang memiliki peran positif, fluktuasi dan kondisi di tingkat daerah, seperti yang terlihat di Jawa Barat, dapat memunculkan dinamika yang menarik dan perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami seberapa besar pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Tenaga kerja (Angkatan Kerja), didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (>15 tahun) yang bekerja atau mencari pekerjaan, merupakan faktor produksi utama yang krusial selain modal dan teknologi. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi (Pane et al., 2024).

Tenaga kerja (Angkatan Kerja) merupakan salah satu faktor produksi utama yang krusial dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, selain modal dan teknologi. Secara teoritis, Angkatan Kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian empiris di Kota Manado (periode 2000-2009) menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), dengan koefisien regresi sebesar 0,200. Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 1% dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,200% (Menajang, 2014).

Tabel 1.3
Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
(orang) Tahun 2015-2024

No	Kabupaten/ kota	Tahun									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Bogor	23150	1.161.388	26001	26114	27916	27336	27863	28973	27367	28619
2	Kabupaten Sukabumi	10142	731.998	11235	11141	11207	11468	12221	13139	14502	15119
3	Kabupaten Cianjur	96016	554.855	94135	98082	10811	11855	11758	12225	13905	14162
4	Kabupaten Bandung	14987	1.042.704	16490	16586	17861	17173	18249	18087	18787	19106
5	Kabupaten Garut	10115	579.434	11332	10959	11550	11561	12003	13303	13917	14384
6	Kabupaten Tasikmalaya	79203	407.863	81603	83087	86760	94470	93610	94071	10098	10255
7	Kabupaten Ciamis	53121	304.080	63493	61205	62489	67919	67106	66452	65780	68160
8	Kabupaten Kuningan	47100	209.028	46240	47528	50205	52167	54278	53082	57416	61812
9	Kabupaten Cirebon	90938	619.905	97446	99594	10649	10603	10826	11105	11923	12617
10	Kabupaten Majalengka	60496	373.184	59936	60192	62787	66437	65159	64412	71949	73914
11	Kabupaten Sumedang	52862	328.497	54480	54864	56967	63766	63986	60947	62615	64645
12	Kabupaten Indramayu	74019	418.829	81653	84685	89236	94070	95452	95284	94172	99160
13	Kabupaten Subang	70379	407.401	79366	77937	83368	82446	84626	86813	90934	93968
14	Kabupaten Purwakarta	41284	289.543	43211	43891	45020	43242	43837	47207	51938	52923
15	Kabupaten Karawang	98768	741.849	11175	11287	11211	11626	11612	11959	12273	12486
16	Kabupaten Bekasi	14946	987.875	15721	16304	17781	18406	19534	20065	15928	16198
17	Kabupaten Bandung Barat	62593	390.735	74095	74741	76696	74764	76593	81955	94712	97873
18	Kabupaten Pangandaran	20210	131.039	24370	24017	23400	24561	24154	26076	27455	27650
19	Kota Bogor	45092	278.839	49582	52217	53559	51432	52900	55654	53453	56198
20	Kota Sukabumi	14706	105.926	14228	14515	15380	13965	14391	15961	17138	17436
21	Kota Bandung	11925	1.234.714	12193	12044	12882	13149	13391	14356	13189	13548
22	Kota Cirebon	14294	131.670	15681	16277	15234	15650	15579	16363	18090	18265
23	Kota Bekasi	11936	674.781	13969	14582	15074	15098	15444	15925	13183	13503
24	Kota Depok	96950	451.343	10854	11013	11846	11956	12071	12587	10332	10480
25	Kota Cimahi	28253	221.850	29705	29753	29651	29375	29225	32057	31559	31185
26	Kota Tasikmalaya	31881	252.413	31187	30834	32288	34328	34258	34706	36977	39535
27	Kota Banjar	84141	67.485	89369	90439	94618	98212	94378	94831	10892	10960

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat & BPS
Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2024*

Dalam konteks penelitian di Provinsi Jawa Barat (2015-2024), peran tenaga kerja menjadi sangat penting mengingat dinamika jumlah Angkatan

Kerja di berbagai wilayah, yang secara umum menunjukkan tren peningkatan signifikan. Data menunjukkan, misalnya, Kabupaten Bogor mengalami peningkatan Angkatan Kerja dari 2.315.088 jiwa pada tahun 2015 menjadi 2.861.902 jiwa pada tahun 2024, dan Kota Bandung meningkat dari 1.192.521 jiwa pada tahun 2015 menjadi 1.354.881 jiwa pada tahun 2024, sehingga analisis penyerapan Angkatan Kerja ini relevan sebagai salah satu pendorong utama PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah IBS dan Angkatan Kerja, muncul indikasi empiris yang bertentangan dengan teori klasik, yakni fenomena *jobless growth*. Studi yang dilakukan oleh (Rochmani et al., 2016) di Kabupaten Kudus menemukan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sebagai proksi PTK, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini akan menguji apakah Jawa barat, sebagai basis industri, juga mengalami disfungsi struktural ini.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro utama dalam menilai kinerja pembangunan suatu negara atau daerah, yang salah satunya dicerminkan oleh kemampuannya dalam mengelola dinamika kependudukan guna memacu produktivitas wilayah. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan faktor yang sangat krusial, karena penduduk bertindak ganda sebagai modal pembangunan (sisi penawaran tenaga kerja) sekaligus sebagai pasar bagi barang dan jasa yang dihasilkan (sisi permintaan). Secara teori, pertumbuhan jumlah penduduk yang optimal dengan kapasitas keterampilan yang baik diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sukirno, 2010).

Penelitian mengenai pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang beragam secara empiris. Salah satunya seperti yang dilakukan dalam penelitian tentang *Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan*

Ekonomi di Indonesia oleh Yosephina & Murtala (2019). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa baik dalam analisis jangka pendek maupun jangka panjang, variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan populasi di skala nasional mampu bertindak sebagai input potensial atau faktor produksi yang efektif dalam mendorong ekspansi output perekonomian. Sebaliknya, jika kuantitas penduduk yang besar ini tidak diimbangi dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang produktif, maka ledakan populasi justru berisiko menjadi hambatan dan memicu lonjakan tingkat pengangguran terbuka yang dapat memperlambat akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1.4
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat (orang)

No	Kabupaten /kota	Tahun									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Bogor	5.459.668	5587.39	5.715.009	5840.9	5965.4	5409.37	5484.15	5556.31	5627.02	5682.3
	Kabupaten Sukabumi	2.434.221	2.444.616	2.453.498	2460.7	2466.3	2718.74	2747.45	2775.31	2802.4	2828.02
3	Kabupaten Cianjur	2.243.904	2.250.977	2.256.589	2260.6	2263.1	2470.56	2500.64	2529.81	2558.14	2584.99
	Kabupaten Bandung	3.534.114	3.596.623	3.657.601	3717.3	3775.3	3616.54	3652.4	3687.25	3721.11	3753.12
5	Kabupaten Garut	2.548.723	2.569.505	2.588.839	2606.4	2622.4	2577.35	2613.53	2648.95	2683.67	2716.95
	Kabupaten Tasikmalaya	1.735.998	1.742.276	1.747.318	1751.3	1754.1	1861.06	1876.89	1892.22	1907.05	1920.92
7	Kabupaten Ciamis	1.168.682	1.175.389	1.181.981	1188.6	1195.2	1226.05	1234.83	1243.32	1251.54	1259.23
	Kabupaten Kuningan	1.055.417	1.061.886	1.068.201	1074.5	1080.8	1162.59	1175.95	1189.01	1201.76	1213.93
9	Kabupaten Cirebon	2.126.179	2.142.999	2.159.577	2176.2	2192.9	2270.35	2301.33	2331.36	2360.44	2387.96
	Kabupaten Majalengka	1.182.109	1.188.004	1.193.725	1199.3	1205.0	1301.57	1315.01	1328.01	1340.62	1352.54
11	Kabupaten Sumedang	1.137.273	1.142.097	1.146.435	1149.9	1152.4	1149.47	1159.26	1168.84	1178.24	1187.13
	Kabupaten Indramayu	1.691.386	1.700.815	1.709.994	1719.2	1728.5	1829.23	1851.73	1873.43	1894.33	1914.04
13	Kabupaten Subang	1.529.388	1546.0	1.562.509	1579.0	1595.8	1605.25	1620.7	1635.56	1649.82	1663.16
	Kabupaten Purwakarta	921.598	932.701	943.337	953.4	962.9	994.33	1008.93	1023.18	1037.07	1050.34
15	Kabupaten Karawang	2.273.579	2.295.778	2.316.489	2336.0	2353.9	2434.09	2465.57	2496.19	2526.0	2554.38
	Kabupaten Bekasi	3.246.013	3.371.691	3.500.023	3630.9	3763.9	3101.73	3148.74	3193.84	3237.42	3273.87
17	Kabupaten Bandung Barat	1.629.423	1.648.387	1666.51	1683.7	1699.9	1782.19	1808.42	1834.23	1859.64	1884.19
	Kabupaten Pangandaran	390.483	392.817	395.098	397.2	399.3	422.41	425.59	428.6	431.46	434.1

No	Kabupaten /kota	Tahun									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19	Kota Bogor	1.047.922	1.064.687	1.081.009	1096.8	1112.1	1040.57	1050.92	1060.94	1070.72	1078.35
	Kota	318.11	321.09	323.78							365.74
20	Sukabumi	7	7	8	326.3	328.7	344.83	350.15	355.42	360.64	
	Kota	2.481.	2.490.	2.497.9			2438.3	2461.4	2484.1		2528.1
21	Bandung	469	622	38	2503.7	2507.9	5	1	5	2506.6	6
	Kota	307.49	310.48	313.32							344.85
22	Cirebon	4	6	5	316.3	319.3	332.58	335.81	338.94	341.98	
		2.714.	2.787.	2859.6			2536.1	2568.0	2598.0	2627.2	2644.0
23	Kota Bekasi	825	205	3	2931.9	3003.9	2	2	7	1	6
		2.106.	2.179.	2.254.5			2046.8	2081.1	2113.6		2163.6
24	Kota Depok	102	813	13	2330.3	2406.8	3	3	2	2145.4	4
	Kota		594.02	601.09							598.7
25	Cimahi	586.58	1	9	607.8	614.3	566.17	574.45	582.65	590.78	
	Kota										750.73
26	Tasikmalaya	657.47	659.60	661.40							
	a	7	6	4	662.7	663.5	713.67	723.1	732.48	741.76	
		181.42	181.90	182.38							209.79
27	Kota Banjar	5	1	8	182.8	183.1	200.27	202.72	205.14	207.51	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2024

Konteks ini sangat relevan untuk Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan dinamika jumlah penduduk yang signifikan dan terus mengalami perubahan dari tahun 2015 hingga proyeksi tahun 2024 berdasarkan data resmi BPS. Merujuk pada tabel 1.4, terdapat heterogenitas spasial yang mencolok dalam sebaran penduduk antar wilayah. Kabupaten Bogor tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Jawa Barat, yaitu sebesar 5.459.668 jiwa pada tahun 2015 dan diproyeksikan mencapai sekitar 5.682.300 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, untuk kategori kota, Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan populasi yang sangat tinggi, bergerak dari 2.714.825 jiwa pada tahun 2015 menjadi proyeksi sekitar 2.644.000 jiwa pada tahun 2024. Di sisi lain, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar konsisten menjadi wilayah dengan basis jumlah penduduk terendah; di mana Kabupaten Pangandaran tercatat sebesar 390.483 jiwa (2015) yang diproyeksikan menjadi sekitar 434.100 jiwa (2024), serta Kota Banjar dengan 181.425 jiwa (2015) yang diproyeksikan menjadi sekitar 209.790 jiwa (2024).

Perbedaan skala demografi yang timpang antar kabupaten/kota di Jawa Barat ini ditambah hasil studi empiris yang membuktikan bahwa kuantitas penduduk berpengaruh nyata terhadap output daerah menjadikan variabel jumlah penduduk sangat krusial untuk diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Urgensi penelitian ini didasarkan pada fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, heterogenitas sebaran

Industri Besar Sedang (IBS), serta fenomena *jobless growth* di mana ekspansi sektor industri seringkali tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal. *Research gap* dalam penelitian ini muncul dari adanya keberagaman temuan pada berbagai studi terdahulu mengenai implikasi pertumbuhan populasi dan ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis kuantitatif yang komprehensif dan terkini (2015–2024) di 27 Kabupaten/Kota. Penggunaan model data panel dalam studi ini bertujuan untuk menguji interaksi simultan antara jumlah IBS, penyerapan tenaga kerja, dan jumlah penduduk guna memahami dinamika kompleks dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada: (1) cakupan periode waktu 2015–2024 yang krusial, yang menangkap dinamika struktural sebelum, saat terjadi guncangan, hingga fase pemulihan pasca-pandemi; (2) penggunaan data panel 27 Kabupaten/Kota sebagai unit *cross-section* untuk mengungkap disparitas spasial kependudukan dan industri secara rinci; serta (3) pengujian model gabungan yang mengintegrasikan aspek sektor riil dan demografi (Jumlah Industri Besar Sedang, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Jumlah Penduduk) secara simultan untuk secara langsung menguji dilema *jobless growth* serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di basis industri terbesar Indonesia. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini diajukan untuk menganalisis secara kuantitatif pengaruh parsial dan simultan dari Jumlah Industri Besar dan Sedang, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2015–2024.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Sugiyono (2023), masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktik, atau antara rencana dengan pelaksanaan. Identifikasi masalah ini akan memetakan semua potensi penyimpangan dan pertanyaan yang muncul terkait variabel penelitian di Provinsi Jawa Barat.

1. Adanya ketidakpastian mengenai efektivitas penambahan jumlah Industri Besar dan Sedang (IBS) sebagai pendorong utama Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Barat, mengingat kecenderungan industri modern yang bersifat padat modal (*capital intensive*) sehingga kontribusinya terhadap ekonomi daerah belum tentu maksimal.
2. Terjadi ketidakseimbangan, di mana pertumbuhan hasil produksi industri tinggi, tetapi Penyerapan Tenaga Kerja (X2) tidak signifikan atau cenderung lambat. Penelitian ini bertujuan melihat mengapa pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah industri Jawa Barat tidak sejalan dengan peningkatan lapangan kerja, yang mengimplikasikan adanya masalah dalam mekanisme transfer tenaga kerja.
3. Terdapat perbedaan yang sangat besar dalam Jumlah Penduduk di 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat, yang mencerminkan adanya ketimpangan beban sekaligus potensi demografi antarwilayah. Ledakan jumlah penduduk di suatu daerah dapat menjadi modal pertumbuhan jika kapasitasnya produktif, namun berisiko menjadi beban ekonomi yang menghambat pertumbuhan jika tidak diimbangi dengan kualitas infrastruktur, tata kelola, dan lapangan kerja yang memadai. Perbedaan karakteristik demografi yang unik ini memengaruhi variasi Pertumbuhan Ekonomi antar-daerah yang harus dikendalikan dalam analisis.
4. Diperlukan model Regresi Data Panel yang kuat (*robust*) dan efisien untuk menguji secara bersamaan pengaruh ketiga faktor utama (X1, X2, X3) sambil memperhitungkan dan mengontrol karakteristik khusus (*heterogenitas*) dari 27 Kabupaten/Kota tersebut, sehingga hasilnya lebih akurat.

C. Pembatasan Masalah

Menurut Sugiyono (2023), pembatasan masalah merupakan tahapan krusial dalam proses penelitian, yang ditempatkan setelah identifikasi masalah dan sebelum perumusan masalah. Fungsi utama dari pembatasan masalah adalah untuk menentukan fokus dan koridor yang jelas dalam

penelitian, sehingga studi yang dilakukan menjadi layak, efektif, dan dapat diselesaikan dalam batas sumber daya yang ada. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memastikan bahwa penelitian menjadi terfokus dan terarah. Karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh peneliti, peneliti memberikan batasan masalah pada **“Pengaruh Jumlah Industri Besar dan Sedang, Penyerapan Tenaga Kerja Dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024”**.

1. Variabel Penelitian: Variabel terikat (Y) adalah Pertumbuhan Ekonomi (dihitung dari Laju Pertumbuhan Ekonomi). Variabel bebas (X) meliputi Jumlah Industri Besar Sedang (X1), Penyerapan Tenaga Kerja (X2), dan Jumlah Penduduk (X3).
2. Lokasi dan Waktu: Lokasi penelitian adalah 27 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Periode waktu yang digunakan adalah tahun 2015 hingga 2024 (10 tahun).
3. Metode Analisis: Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Data Panel (*Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*) serta prosedur pemilihan model terbaik (Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier*).

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Jumlah Industri Besar dan Sedang memiliki Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024?
2. Apakah Penyerapan Tenaga Kerja memiliki Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024?
3. Apakah Jumlah Penduduk memiliki Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024?
4. Apakah Jumlah Industri Besar dan Sedang, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Jumlah Penduduk memiliki Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh yang dihasilkan antara variabel Jumlah Industri Besar dan Sedang terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024.
- b. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh yang dihasilkan antara variabel Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024.
- c. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh yang dihasilkan antara variabel Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024.
- d. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh yang dihasilkan antara variabel Jumlah Industri Besar dan Sedang, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024.

2. Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru mengenai validitas Teori Dualisme Lewis dan teori pertumbuhan berbasis input produksi (Solow) dalam konteks regional yang sangat terindustrialisasi di Indonesia pasca otonomi daerah.

- b. Manfaat praktis

- 1) Bagi akademik

Penelitian ini berfungsi sebagai bahan referensi, studi kasus, dan literatur sekunder bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain di bidang ekonomi, manajemen,

dan pembangunan. Data dan metodologi analisis data panel yang detail dapat menjadi panduan praktis bagi studi ekonometrika lanjutan yang fokus pada data regional dan temporal. Temuan ini juga dapat digunakan sebagai materi diskusi dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Ekonometrika.

2) Bagi pemerintah provinsi jawa barat

Penelitian ini akan memberikan panduan strategis bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait efektivitas arah kebijakan di sektor Industri Besar dan Sedang (IBS). Secara khusus, temuan mengenai Penyerapan Tenaga Kerja akan mengarahkan apakah instrumen kebijakan harus memprioritaskan insentif pada industri padat karya (untuk mengatasi fenomena *jobless growth*) atau padat modal (untuk efisiensi output). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data serta analisis yang kuat mengenai peran ukuran demografi (Jumlah Penduduk) di setiap kabupaten/kota dalam memperburuk atau mengurangi disparitas pembangunan. Informasi ini dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk merumuskan strategi pemerataan pembangunan ekonomi antar-daerah yang diselaraskan dengan daya dukung serta potensi pertumbuhan populasi lokal.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dan referensi utama untuk studi lanjutan di bidang ekonomi regional dan ekonometrika, terutama bagi peneliti yang ingin menguji variabel eksogen atau instrumen lain yang belum disertakan dalam model ini.

F. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bagian ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sample, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjabarkan deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir: Daftar Pustaka

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATIDJIRION